

Cita Ekonomika

JURNAL EKONOMI

Analisa Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan di Kota Ambon

Sherly Ferdinandus
Ventje J. Kuhuparuw

Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan PT. Kimia Farma *Trading* dan *Distribution* Cabang Ambon

Imelda Talahatu

Analisis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maluku Tengah

Ramla D. Saleh

Analisis Pengaruh Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Dana Perimbangan di Provinsi Maluku

Hermin Oppier

Permasalahan Agency Theory Pada Perbankan Syari'ah

Trisna Sary Lewaru

Analisis Pengaruh Citra Merek Terhadap Kempuasan Merek (Studi pada Pengguna *Handphone* Blackberry di Kota Ambon)

Erlinda Tehuayo

Sistem Informasi Akuntansi Permintaan Barang Dari Gudang pada PT. Mauwasa Sejahtera Ambon

Samuel Ratumurun

Analisis Sektor Unggulan dan Pengeluaran Pemerintah di Kota Ambon

Andre Sapthu

Pengaruh Pertumbuhan Laba Bersih dan Struktur Modal Terhadap Kinerja Keuangan (*Return On Equity*) pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kota Ambon

Senda Yunita Leatemia

Keunggulan Layanan Strategik dan Agenda Riset Mendatang

Nur Muhamad & Rainier Hendrik Sitaniapessy

Analisis Komoditi Tanaman Pangan Unggulan Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat

Maryam Sangadji

Tabungan dan Variabel Ekonomi Makro yang Mempengaruhinya di Kota Ambon

Vera Paulin Kay

Kajian Tentang Pengeluaran *Miscellaneous* pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Ambon

Sherly Rutumalessy

CE	Vol. IX	No. 1	Halaman 1 - 105	Ambon Mei 2015	ISSN 1978-3612
----	---------	-------	--------------------	-------------------	-------------------

ANALISIS SEKTOR UNGGULAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH DI KOTA AMBON

Andre Sapthu

Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura
Jl. Ir. M. Putuhena Kampus Poka Ambon

ABSTRACT

This study aims to look at the economic sectors where the leading economic sectors in Maluku province and how the effect of government spending on the development of the leading sectors.

The results showed four sectors as the leading economic sectors, namely the transport and communications sector, finance, leasing and business services, other services sector and the sector Electricity, Gas & Water, trade, hotels and restaurants. Government spending significantly influence the leading economic sector..

Keywords : *seed sector, Government Spending, Location Quotient, Regression.*

I. PENDAHULUAN

Pembangunan dipandang sebagai suatu proses *multidimensional* yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan.

Pembangunan ekonomi daerah diartikan sebagai suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. (Kuncoro 2006)

Musgrave (1989) berpendapat bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi, pemerintah sebagai fasilitator pembangunan menempuh berbagai kebijakan ekonomi yang sejauh mungkin mampu menciptakan iklim kondusif bagi kegiatan-kegiatan produktif untuk semua pelaku ekonomi, anggaran belanja merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Kebijakan fiskal mempengaruhi mekanisme perekonomian melalui bekerjanya anggaran yang berfungsi sebagai alokasi, distribusi dan stabilisasi (Wiralaga, 2005:2).

Pertumbuhan ekonomi terkait erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa yang diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk daerah. Dalam hal ini perekonomian dikatakan tumbuh dan berkembang bila mengalami pertumbuhan atau perkembangan jika tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai lebih tinggi dari waktu sebelumnya atau perkembangan yang baru terjadi jika jumlah barang dan jasa secara fisik yang dihasilkan

perekonomian tersebut bertambah besar pada tahun – tahun berikutnya (adanya pertumbuhan *output*).

Bila memperbandingkan pertumbuhan antara daerah, maka akan ditemui kenyataan bahwa ada daerah yang tumbuh lebih cepat diantaranya disebabkan oleh struktur ekonominya sebagian besar mempunyai laju pertumbuhan yang cepat. Sebaliknya bagi daerah yang pertumbuhannya lambat, sebagian besar sektor ekonominya mempunyai laju pertumbuhan yang lambat.

Salah satu indikator kemajuan perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi secara agregat dapat dihitung melalui Produk Domestik Bruto (PDRB) yang rata-rata tertimbang dari tingkat pertumbuhan sektoralnya, artinya apabila suatu sektor mempunyai kontribusi besar dan pertumbuhannya sangat lambat maka hal ini dapat menghambat tingkat pertumbuhan ekonomi secara agregatif. Sebaliknya apabila suatu sektor mempunyai kontribusi yang relatif besar terhadap totalitas perekonomian maka sektor tersebut mempunyai tingkat pertumbuhan yang tinggi dan sekaligus akan dapat lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kota Ambon merupakan ibu kota Provinsi Maluku yang mempunyai luas wilayah nomor dua terkecil setelah kota Tual bila dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Maluku. Tetapi berdasarkan letak dan kedudukan kota ambon sebagai ibu kota provinsi diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonominya lewat sektor – sektor ekonomi yang potensial melebihi daerah lain yang mempunyai luas wilayah dengan kandungan sumberdaya yang lebih besar karena mempunyai akses yang didukung dengan sarana prasarana berupa pelabuhan dan lapangan udara yang sudah bertaraf internasional.

Berdasarkan uraian diatas maka fokus penelitian ini untuk melihat pengeluaran pemerintah dan sektor – sektor ekonomi unggulan di Kota Ambon.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Peran Pemerintah Dalam Perekonomian

Suatu perekonomian ideal, yang kompetitif sempurna dimana pengaturan alokasi sumber daya bersumber dari pertukaran sukarela antara barang dan uang pada pasar, akan menghasilkan kuantitas maksimal barang dan jasa dari segenap sumber daya yang tersedia dalam perekonomian tersebut. Namun dalam kenyataan sehari – hari, pasar tidak selalu hadir dalam wujudnya yang ideal. Pada prakteknya, perekonomian pasar seringkali terilit kolusi dan monopoli seiring dengan melonjaknya inflasi atau pengangguran; pada prakteknya pula, distribusi pendapatan di tengah masyarakat bersifat *laissez-faire* sangat tidak merata. Untuk mengatasi kelemahan tersebut pemerintah mengambil peran penting dalam perekonomian.

Menurut Mangkusubroto (1993:2) dalam perekonomian moderen peran pemerintah dapat diklasifikasikan dalam tiga golongan besar, yaitu :

1. Peran alokasi sumber – sumber ekonomi;
2. Peran distribusi pada pendapatan dan kekayaan; dan
3. peran stabilisasi perekonomian

Sementara menurut Jones (1996 : 10), peran pemerintah dapat digolongkan menjadi dua, yaitu secara langsung maupun tidak langsung. Pengendalian secara langsung diantaranya adalah berkaitan dengan masalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Sementara pengendalian secara tidak langsung, berhubungan dengan masalah tingkat inflasi, tingkat pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran serta nilai tukar.

Pemerintah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam mempengaruhi perilaku ekonomi. Dengan menetapkan kebijakan fiskal dapat mempengaruhi tabungan, investasi, tingkat pembelajaan dan penerimaan, serta pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Pada saat pemerintah melakukan pembelian barang, akan berdampak produksi dan kegiatan ekonomi terkait lainnya. Dampak langsung dari kenaikan permintaan pemerintah ini adalah naiknya jumlah pekerja dan keuntungan perusahaan tersebut. Keuntungan yang diperoleh akan menaikkan pembeanjaan untuk barang – barang konsumsi, yang secara tidak langsung mendorong naiknya permintaan produk dari perusahaan lain. Permintaan pemerintah ini disebut dengan efek pengganda.

Efek pengganda terus berlanjut ketika pengeluaran konsumsi naik, perusahaan akan

mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja dan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Kondisi ini secara tidak langsung akan mendorong pertumbuhan ekonomi (Mankiw, 2006: 338-339).

Dalam konteks perekonomian Negara sedang berkembang, peranan kebijakan fiskal adalah untuk memacu laju pembentukan modal. Kebijakan fiskal juga memainkan peranan penting dalam rencana pembangunan negara terbelakang. Dalam perencanaan, suatu keseimbangan harus dicapai baik dalam arti riil maupun dalam arti uang. Dengan kata lain, rencana fisik harus disesuaikan dengan rencana keuangan. Penerapan rencana keuangan dan pencapaian perimbangan dalam arti riil dan keuangan jelas banyak tergantung pada tindakan-tindakan fiskal.

Akumulasi modal merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi. Akumulasi modal mencakup semua investasi baru yang berwujud tanah (lahan) peralatan fisik dan semua sumber daya manusia (*human resources*). Dalam hal ini, akumulasi modal akan terjadi bila ada proporsi dari pendapatan sekarang yang ditabung dan selanjutnya diinvestasikan untuk memperbesar *output* pada masa yang akan datang. Investasi ini dapat berupa barang-barang modal produktif yang pada gilirannya akan meningkatkan *output* yang lebih besar bagi suatu negara. Investasi yang lain adalah infrastruktur sosial ekonomi yaitu; jalan raya, listrik, air, sanitasi, dan komunikasi yang akan mempermudah dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan ekonomi. Investasi tidak langsung dapat berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia. Investasi ini akan mempunyai pengaruh yang sama atau bahkan lebih besar terhadap produksi (Rosyadi, 2000:13).

Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, prosentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar, sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi, dan sebagainya. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, Rostow mengatakan dalam Mangkoesobroto (1993; 170), bahwa pembangunan ekonomi aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas

sosial seperti halnya program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya.

Hukum Wagner

Teori Wagner tentang perkembangan pengeluaran pemerintah disebut sebagai *Wagner law of increased government activity*. Teori ini mengemukakan perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam prosentase terhadap GNP, dimana teori ini didasarkan pada pengamatan di negara-negara Eropa, US, dan Jepang pada abad ke-19 (Mangkoesebroto, 1993; 170). Wagner mengemukakan pendapatnya dalam bentuk suatu hukum Wagner, sebagai berikut Dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat.

Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\frac{P_k PP_1}{PPK_1} < \frac{P_k PP_2}{PPK_2} < \dots < \frac{P_k PP_n}{PPK_n}$$

$P_k PP$: Pengeluaran Pemerintah perkapita

PPK : Pendapatan perkapita, yaitu GDP/jumlah penduduk

1,2,...,n : Jangka waktu (tahun)

The Displacement Effect

Dari ketiga teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah tersebut, teori Peacock & Wiseman dianggap sebagai teori dan model yang terbaik (Mangkoesebroto, 1993; 173). Teori mereka sering disebut sebagai *The Displacement Effect*, dimana teori ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Dalam Mangkoesebroto (1993; 173) Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pungutan pajak.

Teori Basis Ekonomi

Teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan suatu wilayah sangat tergantung kepada kemampuan wilayah itu untuk mengekspor barang atau jasa. Menurut North (1975) dalam Temenggung (1999), pertumbuhan wilayah dalam jangka panjang tergantung industri eksportnya. Kekuatan utama

pertumbuhan wilayah adalah permintaan dari luar akan barang dan jasa yang dihasilkan dan diekspor. Permintaan dari luar wilayah mempengaruhi penggunaan modal, tenaga kerja, dan teknologi untuk menghasilkan ekspor sehingga terbentuk keterkaitan ekonomi baik ke belakang maupun kedepan.

Menurut Hoover (1984), pertumbuhan beberapa sektor basis akan menentukan pembangunan daerah secara keseluruhan, sementara sektor non basis hanya merupakan konsekuensi-konsekuensi dari pembangunan daerah. Barang dan jasa dari sektor basis yang diekspor akan menghasilkan pendapatan bagi daerah serta meningkatkan konsumsi dan investasi. Peningkatan pendapatan tidak hanya menyebabkan kenaikan permintaan terhadap sektor basis, tetapi juga akan menaikkan permintaan terhadap sektor non basis berarti juga mendorong kenaikan investasi sektor non basis. Penggunaan teori ini dalam suatu studi dimaksudkan untuk mengidentifikasi sektor-sektor pembangunan yang termasuk sektor basis maupun non basis pada suatu daerah.

Perencanaan Pusat Pelayanan

Konsep pusat pelayanan ditelaah dan diadaptasi dari berbagai teori. Teori-teori tersebut yaitu teori pusat pertumbuhan dan kutub pertumbuhan, teori tempat sentral, *spread-backwash effect*, dan *trickling down* dan *polarization effect*.

(1) Growth Pole (Kutub Pertumbuhan) dan Pusat Pertumbuhan.

Teori Perroux (1970) yang dikenal dengan istilah pusat pertumbuhan merupakan teori yang menjadi dasar dari strategi kebijaksanaan pembangunan industri daerah yang banyak diterapkan di berbagai negara dewasa ini. Perroux mengatakan pertumbuhan tidak muncul di berbagai daerah pada waktu yang sama. Pertumbuhan hanya terjadi di beberapa tempat yang disebut pusat pertumbuhan. Inti dari teori Pusat Pertumbuhan adalah sebagai berikut: **(a)** Dalam proses pembangunan akan timbul industri unggulan yang merupakan industri penggerak utama dalam pembangunan ekonomi daerah. Karena keterkaitan antarindustri sangat erat, maka perkembangan industri unggulan akan mempengaruhi perkembangan industri lain yang berhubungan erat dengan industri tersebut. **(b)** Pemusatan industri pada suatu daerah akan mempercepat pertumbuhan perekonomian, karena pemusatan industri akan menciptakan pola konsumsi yang berbeda antardaerah sehingga perkembangan industri di daerah tersebut akan mempengaruhi perkembangan daerah-daerah lainnya. **(c)** Perekonomian merupakan gabungan dari sistem industri yang relatif aktif (industri unggulan) dengan industri-industri yang relatif pasif yaitu industri yang

tergantung dari industri unggulan atau pusat pertumbuhan. Daerah yang relatif maju atau aktif akan mempengaruhi daerah-daerah yang relatif pasif.

(2) Hierarki Pusat-Pusat Wilayah dan Pusat Pelayanan.

Timbulnya pusat-pusat wilayah disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut: **(a)** Faktor Lokasi Ekonomi. Letak suatu wilayah yang strategis menyebabkan suatu wilayah dapat menjadi suatu pusat. Sebagai contoh adalah Singapura. **(b)** Faktor ketersediaan Sumber Daya. Ketersediaan sumber daya alam pada suatu wilayah akan menyebabkan wilayah tersebut menjadi pusat. Sebagai contoh adalah Medan. **(c)** Kekuatan Aglomerasi. Kekuatan aglomerasi terjadi karena ada sesuatu yang mendorong kegiatan ekonomi sejenis untuk mengelompok pada suatu lokasi karena adanya sesuatu keuntungan. Selanjutnya akan menyebabkan timbulnya pusat-pusat wilayah. Sebagai contoh yang terjadi hampir di seluruh kota-kota di Indonesia. **(d)** Faktor Investasi Pemerintah. Ketiga faktor-faktor di atas menyebabkan timbulnya pusat-pusat wilayah secara alamiah. Sedangkan faktor investasi pemerintah merupakan sesuatu yang sengaja dibuat. Sebagai contoh adalah kota Palangkaraya, ibukota provinsi Kalimantan Tengah. Pada dasarnya pusat wilayah mempunyai hierarki. Hierarki dari suatu pusat ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu: Jumlah penduduk yang bermukim pada pusat tersebut; Jumlah fasilitas pelayanan umum yang tersedia; dan Jumlah jenis fasilitas pelayanan umum yang tersedia. Identifikasi dari pusat-pusat pelayanan mempunyai beberapa tujuan yaitu sebagai berikut: Mengidentifikasi pusat-pusat pelayanan dan daerah pelayanan pada tingkat yang berbeda; Penentuan dari fasilitas infrastruktur pokok untuk memuaskan kebutuhan beragam sektor dari penduduk; dan Pengintegrasian atau pengelompokan pelayanan pada tingkat yang berbeda dan penentuan dari keterkaitan atau jaringan jalan untuk mengembangkan aksesibilitas dan efisiensi.

Penelitian Terdahulu

Hasanudin (2001:69-71) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah dengan hasil estimasi bantuan pemerintah pusat dan PDRB memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran pemerintah sedangkan PAD memberikan pengaruh negatif dan tidak signifikan.

Penelitian Yuliana (2004:64) menerangkan tentang sektor potensial di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) dengan hasil perhitungan LQ sektor berpotensi untuk dikembangkan yakni sektor pertanian, sektor bangunan dan sektor jasa-jasa. Penelitian yang sama Irman (2002:49) dengan hasil sektor pertanian, sektor pembangunan, sektor

keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta sektor jasa-jasa daerah penelitian daerah Kabupaten OKI.

Apriliyanto (2003:56) dengan meneliti identifikasi sektor-sektor ekonomi potensi dan unggulan di Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah yaitu hasil perhitungan LQ, sektor listrik dan air bersih, sektor bangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan jasa-jasa.

Jumarsa (2006) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan variabel yang diuji adalah jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah pegawai, jumlah penduduk miskin, dan pengeluaran daerah tahun sebelumnya. Menggunakan data time series selama periode 1993/1994 sampai dengan tahun 2000 ditujuh daerah di wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari enam kabupaten dan satu kota dan dianalisis dengan menggunakan analisis kuantitatif hasilnya menunjukkan bahwa luas wilayah, jumlah pegawai, penduduk miskin dan pengeluaran pemerintah tahun sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan.

Nursyawalina (2005) dalam penelitiannya mengenai pengeluaran pemerintah daerah terhadap sektor ekonomi unggulan di Kabupaten Lahat dan Muaraenim dengan kesimpulan yang didapatkan yaitu : 1. Sektor ekonomi unggulan berdasarkan perhitungan LQ untuk kabupaten Muaraenim yaitu sektor pertambangan dan penggalian dan sektor listrik, gas dan air bersih, sedangkan untuk sektor ekonomi unggulan di kabupaten Lahat yaitu sektor pertanian, bangunan, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa. 2. Dari hasil regresi sederhana, investasi pemerintah dalam pengeluaran pemerintah di daerah dengan melihat sektor unggulan sangat kecil peranannya. Hal ini terlihat dalam pengeluaran pembangunan pada sektor unggulan sangat rendah dibandingkan pendapatan (PDRB) yang dihasilkan sektor unggulan di Kabupaten Lahat dan Kabupaten Muaraenim sehingga pengaruh pengeluaran pembangunan tidak secara langsung pada sektor unggulan, akan tetapi pengeluaran pemerintah terfokus pada investasi publik yang memfasilitasikan pembangunan pada sarana dan prasarana infrastruktur.

Anggraini (2001) meneliti potensi sektor ekonomi unggulan di Kota Palembang (Periode 1993-2003) yaitu hasil perhitungan LQ pada tahun 1993 hingga tahun 2003 terdapat enam sektor unggulan yaitu sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan,

persewaan jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi semua sektor pada tahun 1993-1996 berlangsung stabil, namun pada tahun 1997-1998 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi, bahkan mencapai pertumbuhan yang negatif. Hal ini disebabkan karena adanya krisis moneter yang melanda Indonesia. Sedangkan pada tahun 1993-2003 semua sektor ekonomi mulai mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi karena mulai stabilnya keadaan perekonomian pasca krisis moneter.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Location Quotient (LQ)

Pada umumnya perhitungan *Location Quotient (LQ)* ini digunakan untuk melihat keunggulan sektoral dari suatu daerah dibanding daerah lainnya, disamping sebagai dasar untuk menentukan apakah suatu sektor digolongkan ke dalam sektor basis atau sektor bukan basis. Besaran nilai LQ dapat digunakan sebagai indikator awal untuk melihat sektor-sektor ekonomi yang potensial (apakah memiliki atau tidak memiliki keunggulan) sektoral dibandingkan dengan keadaan secara rata-rata pada tingkat nasional (dalam hal ini Kota Ambon dibandingkan dengan Propinsi Maluku).

Konsep LQ menyatakan bahwa bila besaran LQ pada suatu sektor lebih besar dari satu ($LQ > 1$) maka sektor ekonomi ini merupakan sektor basis yang memiliki keuntungan lokasi di daerah yang bersangkutan dan kemampuan untuk mengekspor ke wilayah lain. Sektor ini sangat potensi untuk

dikembangkan dan dapat menjadi tumpuan perkembangan ekonomi. Sebaliknya bila besaran LQ lebih kecil dari satu ($LQ < 1$) maka menandakan bahwa sektor tersebut bukanlah sektor basis. Sektor ini tidak memiliki keuntungan lokasi dan cenderung mengimpor dari wilayah lain karena tidak mampu memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri. Analisis LQ diformulasikan sebagai berikut:

$$LQ = \frac{Xr / RVr}{Xn / RVn} \quad \text{atau} \quad LQ = \frac{Xr / Xn}{RVr / RVn}$$

Dimana:

LQ = Koefisien *Location Quotient (LQ)* Kabupaten/Kota.

Xr = PDRB sektor i di Kota Ambon

RVr = Total PDRB Kota Ambon

Xn = PDRB sektor i Propinsi Maluku

RVn = Total PDRB Propinsi Maluku.

Analisis Regresi

Untuk melihat pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap sektor unggulan di Kota Ambon dengan model regresi sederhana sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1$$

Dimana :

Y = Sektor Unggulan

X_1 = Investasi Pemerintah.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Perhitungan LQ

Tabel 1. Hasil Perhitungan *Location Quotient*

Sektor Ekonomi	LQ per Tahun											
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Pertanian	0,57	0,56	0,55	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,53	0,53	0,53
Pertambangan	0,13	0,13	0,13	0,13	0,14	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,18	0,17
Penggalian												
Industri Pengolahan	0,43	0,43	0,44	0,43	0,45	0,47	0,47	0,47	0,46	0,47	0,46	0,46
Listrik, Gas & Air Bersih	1,34	1,33	1,32	1,31	1,31	1,31	1,29	1,30	1,32	1,32	1,30	1,31
Bangunan Konstruksi	0,53	0,52	0,52	0,52	0,51	0,52	0,51	0,53	0,53	0,52	0,54	0,54
Perdagangan, Hotel & Restoran	0,99	0,98	0,97	0,97	0,96	0,95	0,94	0,99	0,98	0,99	0,98	0,99
Pengangkutan & Komunikasi	1,81	1,84	1,86	1,87	1,87	1,87	1,86	1,86	1,88	1,88	1,86	1,86
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	1,55	1,54	1,52	1,51	1,50	1,49	1,48	1,48	1,48	1,50	1,49	1,47
Jasa-jasa lainnya	1,48	1,46	1,44	1,43	1,41	1,40	1,40	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel 1, dari sembilan sektor ekonomi yang ada di Kota Ambon terdapat empat sektor yang dikategorikan sebagai sektor unggulan, yaitu sektor pengangkutan & komunikasi, sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan, sektor jasa-jasa lainya serta sektor Listrik, Gas & Air Bersih, sektor perdagangan, hotel dan restoran. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien LQ yang dimiliki sektor tersebut lebih besar dari satu yaitu masing - masing 1,86, 1,47, 1,42 dan 1,31.

Hasil Analisis Regresi

Hasil estimasi persamaan regresi berganda dengan menggunakan *software* EViews 6.0 adalah sebagai berikut:

$$Y = 1.40175 + 1.325354X_1$$

$$(1.146211) \quad (1.974338)$$

$$R^2 = 0.625901$$

$$\text{Adj } R^2 = 0.607735$$

$$F\text{-hit} = 12.432811$$

$$DW = 3.501658$$

Tingkat signifikansi yang digunakan untuk uji ini adalah 5%. Nilai kritis pada t-tabel yang adalah 1.812461. Sementara nilai t-hitung variabel pengeluaran pemerintah adalah 1,974338 lebih besar dari nilai kritisnya, sehingga hipotesis nol ditolak pada derajat signifikansi 5%. Artinya, secara terpisah variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap sektor ekonomi unggulan di Kota Ambon.

Nilai koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat serta pengaruhnya secara *general*. Semakin besar nilai R^2 (mendekati 1) berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat. Dari hasil estimasi regresi diatas, diperoleh nilai R^2 sebesar 0.625901 dan nilai *Adjusted* R^2 sebesar 0.607735. Artinya, model yang digunakan mampu menjelaskan variasi variabel terikat sebesar 60,77% dan sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

V. PENUTUP

a.) Kesimpulan

Hasil perhitungan LQ di Kota Ambon terdapat empat sektor yang dikategorikan sebagai sektor unggulan, yaitu sektor pengangkutan & komunikasi, sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan, sektor jasa-jasa lainya serta sektor listrik, gas & air bersih, sektor perdagangan, hotel dan restoran. Hasil estimasi persamaan regresi menunjukkan pengeluaran pemerintah signifikan

mempengaruhi sektor ekonomi unggulan di Kota Ambon.

b.) Saran

Pemerintah Kota Ambon perlu menjaga sector ekonomi yang unggulan untuk tetap tumbuh karena memberikan kontribusi bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi serta memberikan perhatian ekstra bagi sector – sector ekonomi lainnya supaya bisa berdampak bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pemerintah lewat instrument pengeluarannya berupa investasi sektor publik dalam menyediakan sarana dan prasaran serta infrastruktur perlu ditujukan kepada sector – sector yang memberikan kontribusi besar bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi

REFERENSI

- Arsyad, Lincoln.** (1999). *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Hoover, E.M.** (1984). *An Introduction to Regional Economics*, 2nd ed. New York: Knopf.
- Jones, Bernard.** (1996). *Financial Management In The Public Sector*, Mc-Graw Hill Companies, England.
- Kuncoro Mudrajad,** (2006). *Ekonomika Pembangunan Edisi Keempat (Teori, Masalah dan Kebijakan)*. Jogyakarta: Penertbit UPP STIM YKPN.
- Mankiw, Ggregory.R.** (2006) *Principle of Economics*, 3rd edition.
- Mangkoesebroto, Guritno.,** (1993). *Ekonomi Publik*, BPFE, Edisi 3, Yogyakarta.
- Musgrave, Richard A,** (1983). “Who Should Tax, Where, and What ?“ Dalam Wallace E Oates (Ed) *The Economics of Fiscal Federalism and Local Finance*. Edward Elgar, Centelham, United Kingdom.
- Rosyadi Imron** (2000), “Hubungan antara Pengeluaran Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi selama periode 1979-1998.” tesis S2 UGM tidak dipublikasikan.
- Temenggung, S.A.** (1999). *Paradigma Ekonomi Wilayah: Tujuan Teori dan Praktis Ekonomi Wilayah dan Implikasi Kebijakan Pembangunan*, dalam BTS..